

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara yang kondisi perekonomiannya termasuk dalam kategori negara berkembang. Perekonomian yang ada di Indonesia sebagian besar bersumber dari pengusaha kecil, salah satunya adalah pengusaha kecil menengah. Usaha Kecil dan Menengah (UMK) merupakan salah satu sektor pendorong perekonomian yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan Usaha Kecil dan Menengah (UMK) mudah dikelola oleh pihak pendiri usaha dan tidak banyak mengeluarkan banyak biaya untuk mendirikan usaha tersebut.

Perkembangan pembangunan di Indonesia dalam segala bidang mulai mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Setelah terjadinya krisis moneter pada tahun 1998, pemerintah Indonesia mulai berbenah untuk mengatur pembangunan yang ada di Indonesia. Peningkatan pembangunan dalam bidang ekonomi dan industri tidak terlepas dari perusahaan yang ada di Indonesia baik perusahaan besar ataupun UMKM sangat menyumbang kemajuan dalam negeri sendiri untuk pengembangan dalam dunia ekonomi.

Pengembangan UMKM merupakan cara mempersiapkan masyarakat untuk lebih maju dalam usahanya untuk meningkatkan kemandiriannya. Selain itu pengembangan UMKM juga dapat menjadi cara dalam pembangunan perekonomian masyarakat Indonesia sendiri. Usaha mikro kecil menengah telah

tumbuh sebelum Indonesia merdeka. UMKM telah diatur pada UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah. Dengan berlakunya undang – undang yang ada maka usaha mikro kecil menengah mendapatkan jaminan dan keadilan usaha, selain itu pemberlakuan tersebut dapat meningkatkan kedudukan, peran dan potensi UMKM dalam mewujudkan ekonomi dan meningkatkan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja serta pengurangan pengangguran bisa dilihat pada tabel jumlah UMKM dan tenaga kerja yang ada di Jawa Timur periode 2017.

Tabel 1.1 jumlah UMKM dan tenaga kerja Provinsi Jawa Timur tahun 2017

Nama Kota / Kabupaten	Jumlah	
	UMKM	Tenaga Kerja
Pacitan	181.115	221.784
Ponorogo	207.561	306.487
Trenggalek	143.455	194.016
Tulungagung	181.409	280.424
Blitar	255.622	406.719
Kediri	251.493	395.355
Malang	414.516	826.375
Lumajang	196.446	287.251
Jember	424.151	729.962
Banyuwangi	296.706	501.379
Bondowoso	172.378	277.434
Situbondo	156.727	263.547
Probolinggo	235.286	397.327
Pasuruan	248.802	403.965
Sidoarjo	171.264	306.481
Mojokerto	155.410	262.651
Jombang	188.614	328.380
Nganjuk	201.463	322.229
Madiun	146.562	242.654
Magetan	154.800	233.043
Ngawi	185.312	309.653
Bojonegoro	281.967	471.481
Tuban	223.998	370.537
Lamongan	252.734	421.825

Gresik	168.393	239.182
Bangkalan	166.768	210.003
Sampang	195.215	264.569
Pamekasan	195.554	257.481
Sumenep	269.005	486.196
Kota Kediri	29.306	51.039
Kota blitar	21.291	35.439
Kota malang	77.778	141.906
Kota probolinggo	26.125	41.120
Kota pasuruan	24.257	44.520
Kota Mojokerto	17.480	31.212
Kota madiun	22.662	41.557
Kota surabaya	260.762	466.779
Kota batu	23.544	45.477
Provinsi Jawa Timur	6.825.931	11.117.439

Sumber Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur

Dalam setiap bidang usaha diharapkan mempunyai laporan keuangan untuk menganalisis kinerja keuangan serta tingkat kemajuan usaha tersebut. Dengan hal ini setiap penyusunan laporan keuangan mempunyai acuan ataupun pedoman yakni Standar Akuntansi Keuangan (SAK) salah satu standar tersebut adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Sesuai dengan ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di jelaskan bahwa standar ini di tunjukkan untuk usaha mikro dan koperasi.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) telah di terbitkan oleh IAI pada tanggal 19 Mei 2009 dan mulai diterapkan untuk menyusun laporan keuangan pada tanggal 01 Januari 2011. Penerapan ini memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan dibandingkan dengan Standar Akuntansi (SAK) umum yang lebih rumit.

Tanpa laporan keuangan dalam sebuah usaha akan kesulitan melakukan kegiatan manajerial yang penting untuk perkembangan usaha. Salah satu kesulitan yang di hadapi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ini adalah ketidak tahuan tentang penyusunan laporan keuangan. Oleh sebab itu di terbitkannya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) ini untuk menjadi pedoman bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan adanya laporan keuangan dapat memantau keuangan agar lebih akurat. Namun demikian kenyataan yang terjadi masih banyak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang masih belum melakukan bahkan tidak mempunyai laporan keuangan serta tidak menyusunnya dengan sebagai mestinya yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Di Kota Mojokerto ini Terdapat 17.480 Usaha Mikro Kecil Menengah ada salah satu contoh usaha mikro yang ada di Mojokerto ini adalah Toko Kain Kaos GADING. Toko tersebut berjalan di bidang konveksi kain milik perseorangan. Dalam hal usahanya toko tersebut memiliki laporan keuangan bulanan tetapi dalam penyusunan laporan keuangan tersebut sangatlah sederhana. Diakui oleh pemilik serta pegawai yang ada di toko tersebut hanya berupa pencatatan pemasukan bulanan beserta pengeluarannya saja oleh karena itu pengambilan laba yang ada di toko hanya berupa perkiraan dari pendapatan kotor di setiap bulannya yang menjadikan pengambilan laba yang tidak akurat. Kurangnya pengetahuan tentang adanya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) membuat faktor penyebab belum diterapkannya laporan keuangan yang sesuai SAK ETAP. Di harapkan dengan adanya penelitian dan pengimplementasian dalam

laporan keuangan yang ada berdasarkan SAK ETAP toko tersebut akan membuat laporan keuangan yang baik, sehingga dapat mempermudah toko dalam mencapai akses bank dan dapat menganalisis kinerja keuangan yang ada dalam toko tersebut serta bisa menentukan laba usaha dengan perhitungan yang akurat.

Dari apa yang sudah diuraikan atas maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “ **Analisis dan Implementasi Penerapan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Toko Kain Kaos GADING Di Kota Mojokerto** “

#### **B. Fokus Penelitian**

untuk membatasi penelitian agar tidak muncul berbagai masalah yang luas atau diluar bahan penelitian, maka terdapat fokus penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilaksanakan di Toko Kain Kaos GADING yang terdapat di Kota Mojokerto.
2. Cara penyusunan laporan keuangan yang ada di Toko Kain Kaos GADING.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dalam pengimplementasian laporan keuangannya setelah menerapkan SAK ETAP.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah pokok dapat diangkat menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyajian laporan keuangan di Toko Kain Kaos GADING?  
Apakah sudah berdasarkan SAK ETAP ?
2. Bagaimana hasil pengimplementasian SAK ETAP terhadap laporan keuangan Toko Kain Kaos GADING ?

**D. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan yang ada di Toko Kaos Gading apakah sudah berdasarkan SAK ETAP.
- b. Untuk mengetahui hasil implementasi atas penerapan SAK ETAP terhadap penyajian laporan keuangan di Toko Kain Kaos Gading.

**E. Manfaat penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang penyusunan dan penyajian laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Dan dapat digunakan untuk landasan bagi penulis dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemilik Toko

Penelitian ini berguna untuk perbandingan dan rekomendasi dalam penyusunan laporan keuangan yang lebih rinci dan rapi.

b. Bagi Universitas

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan dapat juga sebagai bahan rujukan dalam pengembangan ilmu.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna untuk pengembangan ilmu yang telah di dapatkan selama kuliah dan membantu untuk mendapatkan gelar sarjana.